

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR
CAMAT BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*

Oleh :

**REKA ANGGRAINI
165310490**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 133 Perhentian Marpoyan

Tel. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REKA ANGGRAINI

NPM : 165310490

FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : AKUNTANSI S1

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PADA KANTOR CAMAT BANDAR PETALANGAN KAUPATEN
PELALAWAN

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

**H. Burhanuddin, SE. M.Si
Ak**

PEMBIMBING II

Emkhad Arief, SE. M.Si.

Mengetahui :

DEKAN

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., AK., CA



KETUA JURUSAN

Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 133 Perhentian Marpoyan

Tel. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru - 28284

NOTULENSI SEMINAR HASIL

1. Nama Mahasiswa : REKA ANGGRAINI
2. NPM : 165310490
3. Hari/Tanggal : Senin, 16 November 2020
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Sidang dibuka oleh **H. Burhanuddi, SE. M.Si** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si.,AK.,CA 1. Perbaiki latar belakang masalah terkait laporan keuangan.	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 5	
2	Raja Ade Fitrasari M., SE, M.Acc 1. Permasalahan yang diangkat terlalu sedikit, tambahkan mengenai persediaan.	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman 5	

3	Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak			
	1. Judul, Nama, dan NPM tidak perlu dibuat pada Abstrak.	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman i	
	2. Asbtrak bahasa inggris belum dibuat	Sudah diperbaiki	Terlihat dihalaman i	

Mengetahui,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi SI

Disetujui

PEMBIMBING I



H. Burhanuddin, SE. M.Si

PEMBIMBING II



Emkhad Arief, SE. M.Si. Ak





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 133 Perhentian Marpoyan

Tel. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru - 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : REKA ANGGARAINI

NPM : 165310490

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi S1

Sponsor : **Pembimbing I: H. Burhanuddin, SE. M.Si**

Co Sponsor : **Pembimbing II: Emkhad Arief, SE.M.Si Ak**

Judul Skripsi : Analisis Penerapan AKuntansi Pemerintahan pada Kantor Camat Bandar Petalangan KABUPATEN Pelalawan

Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut:

Tanggal	Catatan		Berita Bimbingan	Paraf	
	Sponsor	Co Sponsor		Sponsor	Co Sponsor
08/02/2020	X		- Latar Belakang Masalah		
08/02/2020	X		- Data		

10/02/2020	X		- Rumusan Masalah		
18/02/2020	X		- Acc Proposal		
24/02/2020		X	- Latar Belakang Masalah di perjelas		
28/02/2020		X	- Teknik Penulisan		
09/03/2020		X	- Acc Proposal		
08/09/2020	X		- Kata SKPD diganti denga OPD		
16/09/2020	X		- Acc Skripsi		
17/09/2020		X	- Sinkronkan LBM dengan Hasil		

03/10/2020		X	- Acc Skripsi		
------------	--	---	---------------	--	---

Pekanbaru, 17 Desember 2020

WAKIL DEKAN I



Drs. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 1642/KPTS/FE-UIR/2020, Tanggal 15 November 2020, Maka pada Hari Selasa 17 November 2020 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2020/2021

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama | : Reka Anggraini |
| 2. NPM | : 165310490 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kab. Pelalawan. |
| 5. Tanggal ujian | : 17 November 2020 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B-) 62,5 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

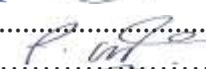
Sekretaris



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. H. Burhanuddin, SE., M.Si
2. Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak
3. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA
4. Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc
5. Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak

()
()
()
()
()

Notulen

1. Hidayat, S.H.I., ME

()

Pekanbaru, 17 November 2020

Mengetahui
Dekan,



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1642 / Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilak-
sanakan ujian skripsi / oral komprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan
mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan
perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Univer-
sitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Reka Anggraini
N P M : 165310490
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Camat
Bandar Petalangan Kab. Pelalawan.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Emkhad Arief, SE., M.Si, Ak	Asisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, IV/a	Methodologi	Anggota
4	Raja Ade Fitrasari, M. SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	Penyajian	Anggota
5	Rona Naula Oktaviani, SE., M.Ak	Asisten Ahli	Bahasa	Anggota
6	Hidayat, S.H.I., ME	Non Fungsional C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan
akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 November 2020
Dekan


Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

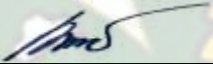
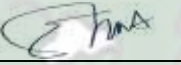
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

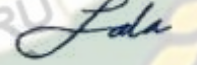
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Reka Anggraini
NPM : 165310490
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kab. Pelalawan.
Hari/Tanggal : Selasa 17 November 2020
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		
2	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc		
3	Rona N. Oktaviani, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **61**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 17 November 2020
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Reka Anggraini
NPM : 165310490
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
Pembimbing : 1. H. Burhanuddin, SE., M.Si
2. Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak

Hari/Tanggal Seminar : Senin 11 Mei 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

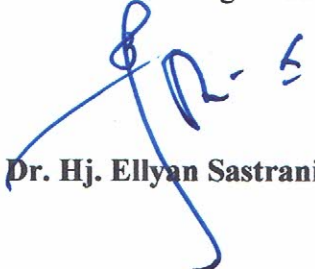
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	H. Burhanuddin, SE., M.Si		1. _____
2.	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak		2. _____
3.	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA		3. _____
4.	Nina Nursida, SE., M.Acc		4. _____
5.	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		5. _____

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

Pekanbaru, 11 Mei 2020
Sekretaris,


Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 073/Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Pembimbing I
2	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak	Asisten Ahli, C/b	Pembimbing II

② Mahasiswa yang dibimbing adalah:
N a m a : Reka Anggraini
N P M : 165310490
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 31 Januari 2020
9/ Dekan,

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

Tembusan : Disampaikan pada:

1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : REKA ANGGRAINI
NPM : 165310490
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 15 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Desember 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan maupun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Program Tinggi ini.

Pekanbaru, 17 Desember 2020

Saya yang membuat pernyataan



REKA ANGGRAINI

ABSTRAK

Penelitian dilakukan pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 64 Tahun 2013. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Data primer dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawantahun 2017 dan 2018, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan staf bendahara yang ada di Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dimana, Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tidak membuat jurnal yang terpisah antara penerimaan Kas dan pengeluaran Kas, semua dicatat didalam jurnal umum serta tidak membedakan jurnal finansial dan jurnal anggaran. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam membuat laporan pertanggungjawaban belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PEMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013.

Kata Kunci: Penerapan, Standar, Pemerintah.

ABSTRACT

The research was conducted at the Head Office of Bandar Petalangan, Pelalawan Regency. The objective of this research is to find out whether the application of accounting is in accordance with Government Regulation (PP) Number 71 of 2010 and Regulation of the Minister of Home Affairs (PEMENDAGRI) Number 64 of 2013. The types of data used are primary and secondary data. The primary data in this study are the financial reports of the Head Office of Bandar Petalangan, Pelalawan Regency in 2017 and 2018, while the secondary data in this study are the results of interviews conducted by the author with treasurer staff at the Head Office of Bandar Petalangan, Pelalawan Regency. The results showed that the application of government financial accounting at the Head Office of Bandar Petalangan, Pelalawan Regency was not in accordance with the Government Accounting Standards. Where, the Head Office of Bandar Petalangan, Pelalawa Regency does not make a separate journal between cash receipts and cash disbursements, all are recorded in a general journal and does not differentiate between financial journals and budget journals. In this study, it can be concluded that, the Head Office of Bandar Petalangan, Pelalawand Regency in making accountability reports is not in accordance with Government Accounting Standards set out in Government Regulation Number 71 of 2010 and PEMENDAGRI Number 64 of 2013.

Keywords: Application, Standard, Government.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penuliis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan terlimpah kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”**. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengetahui ujian Oral Comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Demi

tercapainya kesempurnaan skripsi ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca budiman yang sifatnya membangun.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua ku yang tercinta. Skripsi ini aku persembahkan terkhusus untuk ayahandaku **SUPRIADI** dan ibundaku **SERAH** yang sangat aku cintai karena telah melahirkan, membesarkan, dan mendidikku tanpa mengenal lelah sehingga penulis meraih gelar Sarjan Ekonomi, terimakasih untuk adikku **BAGAS KELANA** yang telah memberi semangat, motivasi dan mewarnai kehidupan kakak.

Dalam penulisan ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Bapak Prof.Dr.H. Syafrinaldi SH.,MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikn kesempatan besar kepada penulis untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya di Universitas Islam Riau.
2. **Bapak Dr. Firdaus A. Rahman, SE.M.si.,Ak.,CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. **Ibu Hj. Siska, M.si.,Ak.,CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi SI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

4. **Bapak Burhanuddin** selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya dan fikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. **Bapak Emkhad Arief** selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya dan fikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah mendidik penulis mulai dari tingkat persiapan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Faisal, S.STP selaku Camat Bandar Petalangan yang telah memberikan masukan bagi kemudahan untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penulis skripsi.
8. Terima kasih untuk teman-teman terdekat ku : Dani Aprilya, Dinda Ulfionita, Reficha Hendri Septia, yang telah setia untuk menunggu dalam suka dan duka serta memberikan dorongan, semangat, motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih buat temen-temen seperjuangan, Akuntansi (D) dan angkatan 2016 Fakultas Ekonomi yang sudah bersama-sama menjalani proses kuliah dari awal masuk kuliah hingga akhir.
10. Penulis ucapkan terima kasih kepada kakak dan abang senior yang memberikan dorongan dan motivasi berharga bagi penulis untuk lebih giat dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahan skripsi yang telah penulis buat jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi yang telah penulis buat dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Apabila ada kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki skripsi maka penulis selaku pembuatan skripsi ini akan menerima kritikan dan saran tersebut dengan senang hati. Akhir kata, Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

REKA ANGGRAINI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
2.1 Telaah Pustaka	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi	8
2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	9
2.1.3 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Daerah.....	10
2.1.4 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah.....	10
2.1.4.1 Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah.....	10
2.1.4.2 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah	11
2.1.5 Lingkungan Akuntansi Daerah	12
2.1.6 Perbedaan antara Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Akuntansi Perusahaan.....	14
2.1.7 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah.....	15
2.1.8 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	19
2.2 Hipotesis	20
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian.....	21
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	21
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.4 Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	23
4.1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Bandar Petalangan	24
4.1.2 Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Bandar Petalangan.....	25
4.1.3 Visi Misi	28
4.2 Hasil Penelitian	28

4.2.1 Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kantor Camat	
Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	28
4.2.1.1 Pengakuan Pendapatan dan Beban	28
4.2.1.2 Proses Akuntansi	29
4.2.2 Prosedur Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada	
Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	49
4.2.3 Laporan Keuangan Kantor Camat Bandar Petalangan	
Kabupaten Pelalawan	53
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	xi

DAFTAR TABEL

Table 2.1	Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Perusahaan	25
Tabel 4.1	Buku Kas Umum	30
Table 4.2	Jurnal Umum	32
Table 4.3	Jurnal Umum	35
Table 4.4	Buku Besar	38
Table 4.5	Buku Besar	38
Table 4.6	Buku Besar	39
Table 4.7	Buku Besar Pembantu	39
Table 4.8	Buku Besar	40
Table 4.9	Neraca Saldo.....	40
Table 4.10	Jurnal Umum Penyesuaian	43
Table 4.11	Jurnal Umum Penyesuaian	44
Table 4.12	Jurnal Umum	45
Table 4.13	Jurnal Penyesuaian	45
Table 4.14	Jurnal Umum Penyesuaian	47
Table 4.15	Jurnal Umum	47
Table 4.16	Jurnal Penyesuaian	48
Table 4.17	Jurnal Umum Penutup.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Pegawai Kantor Camat Bandar Petalangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan	25
-------------------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	NERACA
LAMPIRAN II	LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAMPIRAN III	LAPORAN OPRASIONAL
LAMPIRAN IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAMPIRAN V	DAFTAR INVENTARIS
LAMPIRAN VI	DOKUMENTASI
LAMPIRAN VII	BUKU KAS UMUM
LAMPIRAN VIII	STRUKTUR ORGANISASI
LAMPIRAN IX	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan aktifitas ekonomi, maka tidak dapat dihindarkan bahwa lembaga pemerintahan juga membutuhkan jasa akuntansi, baik untuk meningkatkan mutu pengawasan, maupun untuk menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akan tetapi karena sifat lembaga pemerintahan berbeda dengan sifat perusahaan, maka sifat akuntansi pemerintahan juga berbeda dengan sifat akuntansi perusahaan.

Dimana perbedaan keduanya terdapat pada tujuan, pemilikan, manajemen, dan juga pendapatannya. Tujuan dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan tujuan utama dari perusahaan adalah mencari laba (keuntungan). Oleh karena itu, akuntansi pemerintah dikelompokkan sebagai bidang akuntansi yang berdiri sendiri.

Pengelolaan akuntansi daerah merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah, karena akuntansi daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

yang digunakan untuk pengambilan keputusan, kebijakan akuntansi dan rujukan dalam proses pembuatan laporan keuangan berbasis akrual.

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012:57-80), tahapan-tahapan atau siklus akuntansi adalah 1) Mendokumentasikan semua transaksi dalam kegiatan. 2) Mencatat semua transaksi secara kronologis kedalam buku jurnal, tahapan ini disebut menjurnal. 3) Meringkas kedalam buku besar semua transaksi-transaksi yang sudah dijurnal. 4) Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya dalam neraca saldo. 5) Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang paling mutakhir. 6) Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian. 7) Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada neraca saldo setelah penyesuaian seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. 7) Jurnal Penutup.

Kantor Camat Bandar Petalangan adalah salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada di kecamatan Bandar Petalangan yang mana setiap tahunnya diwajibkan untuk membuat laporan keuangan disetiap tahunnya.

Pelaksanaan akuntansi pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2010.

Dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat Bandar Petalangan menerapkan basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sistem pengakuan ini untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, pengakuan ini untuk penyusunan ini untuk penyusunan dan penyajian Neraca.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan pada Kantor Camat Bandar Petalangan adalah dengan membuat Buku Kas Umum (Lampiran VII). Dimana dalam Buku Kas Umum tersebut terdapat kolom tanggal, nomor bukti, uraian, kode rekening, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selanjutnya Kantor Camat Bandar

Petalangan membuat Laporan Keuangan seperti: 1) Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran II) yang formatnya terdiri dari pendapatan, belanja operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, belanja modal terdiri atas belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, dan belanja jalan, irigrasi dan jaringan, surplus/defisit, pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran, 2) Neraca (Lampiran I) formatnya terdiri dari asset lancar terdiri atas kas dan persediaan, aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, akumulasi penyusutan, asset lainnya terdiri atas asset tidak berwujud, akumulasi amortisasi asset tidak berwujud, dan asset lainnya. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek terdiri atas utang kepada pihak ketiga/utang belanja, dan ekuitas yang terdiri atas ekuitas dan RK PPKD, 3) Laporan Oprasional (Lampiran III) yang menyajikan pos-pos seperti pendapatan-LO, beban dari kegiatan oprasional, dan surplus/defisit-LO. 4) Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran IV) yang menyajikan pos-pos seperti ekuitas awal yang terdiri atas surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar terdiri atas koreksi nilai akumulasi penyusutan, koreksi nilai asset lainnya, dan koreksi nilai akumulasi amortisasi asset tak berwujud, dampak kumulatif perubahan kesalahan mendasar terdiri atas koreksi nilai aset tetap dan koreksi nilai akumulasi penyusutan, penyesuaian eliminasi untuk penghapusan akun RK PPKD (Rencana Kerja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) dan RK SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan ekuitas akhir.

Dari tahapan-tahapan siklus akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Camat Bandar Petalangan diatas ditemukan satu permasalahan yang ada pada Kantor Camat Bandar Petalangan yaitu :

Kantor Camat Bandar Petalangan tidak melakukan pemisahan jurnal, antara penerimaan kas dan pengeluaran kas, dimana semua transaksi atau kejadian keuangan tersebut dibukukan pada Buku Kas Umum yang disediakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa adanya pemisahan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Dengan penyajian jurnal yang tidak semestinya, mengakibatkan sulit untuk mengidentifikasi transaksi mana yang merupakan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selanjutnya, Kantor Camat Bandar Petalangan tidak membuat jurnal penyesuaian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai penerapan akuntansi keuangan dalam penelitian ini dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah adalah Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang akuntansi secara umum dan bidang akuntansi daerah secara khususnya, penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi keuangan daerah yang diterapkan di Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
2. Bagi Kantor Camat Bandar Petalangan penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan.
3. Bagi penelitian, sebagai referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti dimasa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis membaginya dalam 5 bab seperti yang diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka dan Hipotesis

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini antara lain Pengertian Akuntansi, Pengertian Kuntansi Keuangan Daerah, Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah, Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah, Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah, Perbedaan Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi Perusahaan, Siklus Akuntansi Keuangan Daerah, Peraturan-peraturan Pemerintahan Daerah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang lokasi/objek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang sejarah kantor Camat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V : Simpulan dan Saran

Bab ini menyimpulkan dari hasil penelitian dan pengajuan saran-saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

Akuntansi ditinjau dari perkembangannya selalu mengalami peningkatan baik sistem maupun aspek kinerja akuntansi itu sendiri. Hal ini dapat dari semakin meningkatnya penggunaan sistem akuntansi yang sesuai dan dapat diterima umum dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian Negara yang khususnya tercerminkan dari pengelolaan keuangan pemerintahan. Berikut penjelasan mengenai akuntansi keuangan daerah.

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Agoes (2010:2), akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Wild, ddk (2014:3), akuntansi adalah sistem informasi dan pengukuran yang mendefinisikan, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan tentang kegiatan bisnis organisasi.

Menurut Surwadjono (2015:10), akuntansi adalah perangkat yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan Negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akuntansi sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Dapat disimpulkan akuntansi adalah proses pengukuran yang melibatkan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran setiap transaksi bisnis yang terjadi dalam kegiatan bisnis yang dikomunikasikan melalui laporan keuangan selama periode tertentu bagi pengguna yang membutuhkan.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina (2015:3), akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintah daerah, akuntansi keuangan daerah ini diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik.

Menurut Halim (2012:40), akuntansi daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota dan provinsi) yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah antara lain: DPRD (Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah), BPK (Badan Pengawas Keuangan), investor, kreditor, donator, analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah pusat dan daerah (kabupaten, kota dan provinsi).

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Daerah

Menurut Sujarweni (2015:90), tujuan dan fungsi dari laporan keuangan daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, social, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintah.
2. Untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organsasional.

2.1.4 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.4.1 Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012:44), akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan peaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Ada beberapa macam sistem yang dapat digunakan yaitu:

1. *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku saja. Dalam system ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3. *Triple Entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh sebab itu, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah juga mencatat transaksi tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

Entry artinya setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali pencatatan. Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double*) dinamakan menjurnal, pencatatan harus menjaga persamaan dasar akuntansi, kedua sisi harus seimbang.

2.1.4.2 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban.

Sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruhi oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:41), dasar akuntansi dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut akan dicatat.

2. Basis akrual (*Accrual Basis*)

Basis akrual adalah suatu metode perbandingan antara pendapatan dengan beban, pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan beban dilaporkan pada terjadinya transaksi dan beban dilaporkan pada saat beban tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha.

3. Basis Kas Modifikasian (*Modified Cash Basis*)

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis Akrual Modifikasian (*Modified Accrual Basis*)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi pertimbangan kepraktisan.

2.1.5 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Muhamad (2012:40-41) mengemukakan bahwa:

Seluruh informasi dan data-data yang disusun dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal, yaitu pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung biasanya disebut sebagai Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.

2. BPK (Badan Pengawas Keuangan)

BPK adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang termasuk dalam badan ini adalah: Inspektorat Jendral dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Investor, Kreditor, dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

5. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk atau jasa pemerintah daerah.

6. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggung jawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota)

Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

2.1.6 Perbedaan antara Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi

Perusahaan

Karakteristik organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi perusahaan atau komersial. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktek akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut. Berikut perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan :

Tabel 2.1

Perbedaan antara Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Perusahaan

No	Akuntansi Perusahaan	Akuntansi Pemerintahan
1	Akuntansi perusahaan mempunyai laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.	Akuntansi pemerintah tidak mempunyai laporan laba rugi, namun sebagai gantinya pada terhadap laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.

2	Sumber pendapatan akuntansi perusahaan berasal dari penjualan barang dan jasa.	Akuntansi pemerintahan pendapatan berasal dari penetapan-penetapan peraturan secara hukum, misalnya adalah pajak.
3	Akuntansi perusahaan pihak yang berwenang untuk mengaudit laporan keuangan adalah akuntan publik.	Akuntansi pemerintahan pihak yang berwenang memeriksa laporan keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4	Akuntansi perusahaan tunduk pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).	Akuntansi pemerintahan tunduk pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dirancang oleh Komite Standar akuntansi Pemerintah (KSAP) dan diatur dalam PP No 71 Tahun 2010.
5	Pertanggungjawaban laporan keuangan perusahaan ditujukan kepada pemegang saham dan kreditur.	Pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah ditujukan kepada parlemen dan masyarakat luas.
6	Dasar pencatatan akuntansi perusahaan adalah basis akrual.	Dasar pencatatan akuntansi pemerintahan adalah basis kas.

2.1.7 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Pada dasarnya Akuntansi Keuangan Daerah mengikuti siklus akuntansi. Yang dimaksud siklus akuntansi adalah proses penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterima.

Menurut Halim dan Muhammad (2012:57-80), tahapan-tahapan atau siklus akuntansi adalah:

1. Bukti transaksi

Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak.

2. Jurnal transaksi

Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut kedalam jurnal organisasi tersebut. Dalam mendebet dan mengkreditkan akun harus seimbang.

3. Buku besar

Entri jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar dimana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat.

4. Neraca saldo

Neraca saldo adalah ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi.

5. Jurnal penyesuaian

Pada akhir periode akuntansi suatu organisasi, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga suatu organisasi dapat membuat laporan keuangan.

6. Laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah jika mengacu pada SAP Nomor 1 terdiri dari 2 hal, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. Sehingga seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah antara lain:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca (PP Nomor 71 tahun 2010) adalah jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 laporan operasional adalah jenis laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menyajikan ikhtisar sumber daya

ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan SAP Nomor 1 laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos diantaranya yaitu: ekuitas awal, surplus atau defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, koreksi mendasar dari persediaan periode sebelumnya, perubahan nilai asset tetap, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 CaLK merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang memuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rinci dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

7. Jurnal penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 (nol) pada awal periode akuntansi.

2.1.8 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan aktivitas keseharian yang berhubungan dengan keuangan harus dilandasi dengan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah.

Berikut peraturan-peraturan yang berhubungan dengan akuntansi daerah:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tak lagi tertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota saja. Tapi, dalam Permendagri itu juga disebutkan, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dana melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan.
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual paling lambat tahun anggaran 2015. Selain mengatur SAP berbasis akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP berbasis kas menuju akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis yaitu Diduga Penerapan Akuntansi Pemerintahan pada Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bagian keuangan mengenai proses penyusunan keuangan daerah, proses penyusunan pencatatan keuangan daerah, proses pengesahan keuangan daerah, proses pengawasan keuangan daerah, serta proses pengesahan perhitungan keuangan daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam bentuk jadi, seperti visi dan misi Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, struktur organisasi, dan bukti pencatatan laporan keuangan Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan berbagai keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan langsung dengan staf bagian keuangan pada kantor Camat Bandar Petalangan mengenai aktivitas, sejarah perkembangan, kebijakan operasional, serta kebijakan dibidang akuntansi.
2. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung data-data yang dimiliki kantor Camat Bandar Petalangan seperti visi misi, struktur organisasi dan laporan keuangan.

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ini maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan kemudian disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Kecamatan Bandar Petalangan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah $\pm 36.996,29$ Ha, mempunyai 11 Desa dengan pusat pemerintah berada di Desa Rawang Empat, 11 Desa tersebut yaitu :

1. Kuala Sumundam
2. Rawang Empat
3. Tambun
4. Terbangiang
5. Lubuk Terap
6. Angkasa
7. Sialang Godang
8. Lubuk Raja
9. Sialang Bungkok
10. Lubuk Keranji Timur
11. Air Terjun

Kecamatan Bandar Petalangan juga memiliki batas-batas wilayah yang dapat membedakan mana-mana yang termasuk dalam wilayah kecamatan Bandar Petalangan dan mana yang tidak termasuk. Batas-batas wilayahnya yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sialang Godang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Sumundam
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terbangiang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Angkasa

Kecamatan Bandar Petalangan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai Petani, disamping itu juga ada bekerja di sektor pemerintahan baik itu Pegawai Negeri Sipil, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, di samping itu juga ada yang bekerja sebagai Pedagang dan lain sebagainya.

Mengenai agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Bandar Petalangan adalah agama yang diakui oleh Pemerintah. Namun mayoritas penduduk Kecamatan Bandar Petalangan adalah beragama Islam, dan sarana tempat ibadah di wilayah Kecamatan Bandar Petalangan yang ada hanya dua tempat ibadah saja yaitu Masjid dan Gereja.

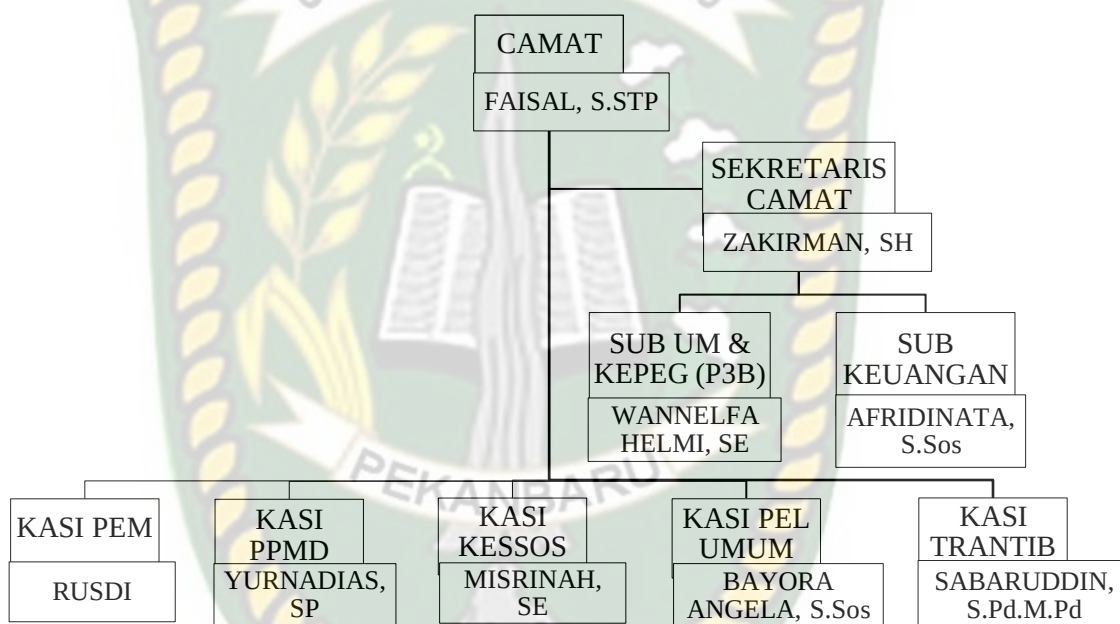
4.1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Bandar Petalangan

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat, sebagaimana setiap organisasi tertentu mempunyai struktur organisasi yang

menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab untuk setiap bagian.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Bandar Petalangan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Struktur Pegawai
Kantor Camat Bandar Petalangan
Pemerintah Kabupaten Pelalawan



4.1.2 Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Bandar Petalangan

Adapun tugas masing masing pegawai Kantor Camat Bandar Petalangan, diantaranya yaitu :

1. Camat

Camat merupakan Pimpinan Kecamatan dan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah diwilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten atau Kota. Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintah yaitu :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undang
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana fasilitas Pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan menyelenggarakan kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan
- f. Membina penyelenggara Pemerintah Desa atau Kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

2. Sekretaris Camat

- a. Perencanaan dan pengendalian serta evaluasi administrasi perkantoran
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan
- c. Pengendalian surat-surat dan nota dinas
- d. Pengendalian urusan perlengkapan

- e. Pengendalian urusan rumah tangga
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat

3. Kasi Pemerintahan

- a. Merencanakan perkembangan dan melaksanakan urusan ekonomi daerah
- b. Melaksanakan tugas pemerintah pusat
- c. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan pemerintah kelurahan
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan capil
- e. Melaksanakan administrasi monografi dan peta wilayah kecamatan dan kelurahan
- f. Melaksanakan pembinaan social politik
- g. Melaksanakan tertib administrasi pertahanan
- h. Mengerjakan buku harian camat
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat..

4. Kasi Pelayanan Umum

- a. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan umum baik internal maupun eksternal
- b. Merumuskan dan melaksanakan bidang kekayaan dan inventarisasi
- c. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan bidang k3 seta sarana dan prasarana umum
- d. Melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian
- e. Pelayanan pajak bumi dan bangunan
- f. Pelayanan pendapatan daerah

- g. Pelayanan bidang penerangan
- h. Pelayanan kebersihan kantor
- i. Pelayanan dan persiapan apel atau upacara
- j. Pelayanan ketatausahaan kantor dan arsip
- k. Pelayanan tamu-tamu camat
- l. Tugas-tugas lain yang diberikan camat.

4.1.3 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang terdapat pada pemerintahan Camat Bandar Petalangan, yaitu: Visi “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DI KECAMATAN BANDAR PETALANGAN”. Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Camat Bandar Petalangan akan menjalankan beberapa misi, yaitu :

- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional di Bidang Pelayanan.
- 2. Muwujudkan Kualitas dan Kuantitas Sarana yang memadai.
- 3. Mewujudkan Moetode Kerja yang cepat dan tepat.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Penerapan Akuntansi Keuangan pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

4.2.1.1 Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat Bandar Petalangan berbasis kas untuk pengakuan pendapatan (pendapatan asli daerah, pendapatan

transfer dan lain-lain pendapatan yang sah), belanja (belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer) dan pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan aset (aset lancar dan aset tetap), kewajiban (kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang) dan ekuitas (ekuitas dan lancar dan ekuitas dana investasi) dalam Neraca.

4.2.1.2 Proses Akuntansi

Proses akuntansi pada Kantor Camat Bandar Petalangan dimulai dari pencatatan pada buku kas umum. Pencatatan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu sebagai berikut :

- 1) Transaksi dicatat dalam buku kas umum, penerimaan kas dicatat dalam kolom penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat dalam kolom pengeluaran kas. Contoh transaksi sebagai berikut :

03 Nov 2017 : Diterima SP2D/LS Nomor 5246/SP2D/2017 pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Bandar Petalangan bulan November 2017 kode rekening 5.1.1.01.01 sebesar Rp79.020.482, dengan rincian sebagai berikut :

- Gaji pokok PNS	Rp57.402.800
- Tunjangan keluarga	Rp 6.900.150
- Tunjangan jabatan	Rp 6.950.000
- Tunjangan fungsional umum	Rp 1.275.000

- Tunjangan beras Rp 4.562.460
- Pembulatan gaji Rp 985
- Iuran asuransi kesehatan Rp 1.929.087

14 Nov 2017 : Dibayarkan biaya Matrai Kantor Camat Bandar Petalangan Bulan

November kode rekening 5.2.2.01.04 sebesar Rp1.075.000

14Nov 2017:Dibayarkan biaya Alat Kebersihan Kantor Camat Bandar

Petalangan Bulan November kode rekening 5.2.2.01.05 sebesar

Rp5.057.900

Berdasarkan transaksi-transaksi di atas Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan mencatat transaksi tersebut ke dalam Buku Kas Umum seperti berikut ini :

A. Buku Kas Umum

Tabel 4.1
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Buku Kas Umum
November 2017

Tgl	No. Bukti	Uraian	Kode Rek	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
03 Nov 2017	5246/SP2D/2017	Diterima SP2D LS		79.020.482	
		Gaji pokok PNS/ uang representasi	5.1.1.01.01		57.402.800
		Tunjangan keluarga	5.1.1.01.02		6.900.150
		Tujangan jabatan	5.1.1.01.03		6.950.000
		Tunjangan fungsional	5.1.1.01.05		1.275.000

		umum			
		Tunjangan	5.1.1.01.06		4.562.460
		beras			
		Pebulatan gaji	5.1.1.01.08		985
		Iuran asuransi	5.1.1.01.09		1.929.087
		kesehatan			
03 Nov 2017	5251/SP2D/ 2017	Diterima oleh bendahara untuk Belanja LS		18.720.000	
		Dibayarkan honorarium jasa kebersihan Kantor Camat Bandar Petalangan bulan Oktober 2017	5.2.1.02.02		18.720.000
30 Nov 2017	5503/SP2D/ 2017	Diterima GU Bulan November 2017		77.277.100	

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan

B. Jurnal Umum

Selanjutnya Kantor Camat Bandar Petalangan membuat jurnal umum untuk mencatat transaksi pembayaran gaji, penerimaan kas untuk bendahara pengeuaran, pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, jurnal finansial dan jurnal anggaran. Semuanya digabung digabung di dalam jurnal umum seperti berikut :

Tabel 4.2
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Jurnal Umum
November 2017

Tgl	No. Bukti	Uraian	Kode. Rek	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
03 Nov 2017	5246/ SP2D/ 2017	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO	9.1.1.01.01	57.402.800	79.020.482
		Tunjangan Keluarga-LO	9.1.1.01.02	6.900.150	
		Tunjangan Jabatan-LO	9.1.1.01.03	6.950.000	
		Tunjangan Fungsional Umum-LO	9.1.1.01.05	1.275.000	
		Tunjangan Beras-LO	9.1.1.01.06	4.562.460	
		Pembulatan Gaji-LO	9.1.1.01.08	985	
		Iuran Asuransi Kesehatan-LO	9.1.1.01.09	1.929.087	
		RK PPKD	3.1.3.01.01		
		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01	57.402.800	
		Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02	6.900.150	
		Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03	6.950.000	
		Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05	1.275.000	
		Tunjangan Beras	5.1.1.01.06	4.562.460	
		Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08	985	
		Iuran Asuransi Kesehatan	5.1.1.01.09	1.929.087	
		Estimasi Perubahan SAL	3.1.2.05.01		
03 Nov 2017	5251/ SP2D/ 2017	Honorarium jasa kebersihan	9.2.1.02.06	18.720.000	18.720.000
		RK PPKD	3.1.3.01.01		
		Honorarium jasa kebersihan	5.2.1.02.06	18.720.000	18.720.000
		Estimasi perubahan SAL	3.1.2.05.01		
14	0001/	Beban Matrai	9.2.2.01.04	1.075.000	

Nov 2017	BP/XI /2017	Beban Air	9.2.2.03.02	1.700.000	77.277.100
		Beban Listrik	9.2.2.03.03	1.708.000	
		Beban Listrik	9.2.2.03.03	502.000	
		Beban Alat Kebersihan	9.2.2.01.05	5.057.900	
		Beban ATK	9.2.2.01.01	15.770.200	
		Beban Cetak	9.2.2.06.01	7.960.000	
		Beban Penggandaan fotocopy	9.2.2.06.02	1.092.000	
		Beban Surat Kabar	9.2.2.03.05	600.000	
		Beban Makan dan Minuman rapat	9.2.2.11.02	6.200.000	
		Beban Makan dan Minum Tamu	9.2.2.11.02	4.099.000	
		Beban Makan dan Minum Kantor Lurah	9.2.2.11.02	3.025.000	
		Beban BBM	9.2.2.01.06	2.020.000	
		Beban Jasa Service kendaraan	9.2.2.05.01	525.000	
		Beban Suku Cadang	9.2.2.05.02	700.000	
		Beban pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	9.2.2.20.12	2.133.000	
		Beban Alat Listrik dan Elektronik	9.2.2.01.03	2.580.000	
		Beban BBM	9.2.2.01.06	1.980.000	
		Beban Spanduk	9.2.2.01.12	2.000.000	
		Beban Honorarium	9.2.1.02.06	8.400.000	
		Beban ATK PKK	9.2.2.01.01	1.400.000	
		Beban Hadiah Lomba	9.2.2.02.15	3.350.000	
		Beban Transportasi	9.2.2.03.12	900.000	
		Beban Makan dan Minum PKK	9.2.2..11.07	2.500.000	
		Kas dibendahara pengeluaran	1.1.1.03.01		
		Belanja Matrai	5.2.2.01.04	1.075.000	
		Belanja Air	5.2.2.03.02	1.700.000	
		Belanja Listrik	5.2.2.03.03	1.708.000	
		Belanja Listrik	5.2.2.03.03	502.000	
		Belanja Alat Kebersihan	5.2.2.01.05	5.057.900	
		Belanja ATK	5.2.2.01.01	15.770.200	
		Belanja Cetak	5.2.2.06.01	7.960.000	

		Belanja Penggandaan fotocopy	5.2.2.06.02	1.092.000	
		Belanja Surat Kabar	5.2.2.03.05	600.000	
		Belanja Makan dan Minuman rapat	5.2.2.11.02	6.200.000	
		Belanja Makan dan Minum Tamu	5.2.2.11.02	4.099.000	
		Belanja Makan dan Minum Kantor Lurah	5.2.2.11.02	3.025.000	
		Belanja BBM	5.2.2.01.06	2.020.000	
		Belanja Jasa Service kendaraan	5.2.2.05.01	525.000	
		Belanja Suku Cadang	5.2.2.05.02	700.000	
		Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5.2.2.20.12	2.133.000	
		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.2.2.01.03	2.580.000	
		Belanja BBM	5.2.2.01.06	1.980.000	
		Belanja Spanduk	5.2.2.01.12	2.000.000	
		Belanja Honorarium	5.2.1.02.06	8.400.000	
		Belanja ATK PPK	5.2.2.01.01	1.400.000	
		Belanja Hadiah Lomba	5.2.2.02.15	3.350.000	
		Belanja Transportasi	5.2.2.03.12	900.000	
		Belanja Makan dan Minum PPK	5.2.2.11.07	2.500.000	
		Estimasi perubahan SAL	3.1.2.05.01		77.277.100
30 Nov 2017		Kas dibendaara pengeluaran RK PPKD	1.1.1.03.01	77.277.100	77.277.100

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan

Seharusnya Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan membuat jurnal secara terpisah antara jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas serta membedakan antara jurnal Finansial dan Jurnal Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai berikut

Tabel 4.3
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Jurnal Umum
November 2017

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
03 Nov 2017	5246/SP2D /2017	Jurnal Finansial Kas dibendahara pengeluaran SKPD RK PPKD Jurnal Anggaran Tidak ada jurnal anggaran karena bukan merupakan transaksi pendapatan atau belanja (penerimaan SP2D LS untuk pembayaran gaji induk PNS)	79.020.482	79.020.482
03 Nov 2017	5246/SP2D /2017	Jurnal Finansial Beban Gaji PNS Kas dibendahara pengeluaran SKPD Jurnal Anggaran Belanja Gaji PNS Estimasi perubahan SAL	79.020.482 79.020.482	79.020.482 79.020.482
03 Nov 2017	5251/SP2D /2017	Jurnal Finansial Kas dibendahara pengeleuaran SKPD RK PPKD Jurnal Anggaran Tidak ada jurnal anggaran karena bukan merupakan transaksi pendapatan atau belanja(menerima SP2D LS untuk pembayaran honor jasa kebersihan)	18.720.000	18.720.000
03 Nov 2017	5251/SP2D /2017	Jurnal Finansial Beban Honorarium jasa kebersihan	18.720.000	

		Kas dibendahara pengeluaran SKPD		18.720.000
		Jurnal Anggaran Belanja Honorarium jasa kebersihan	18.720.000	
		Estimasi perubahan SAL		18.720.000
14 Nov 2017	0001/BP/X I/2017	Jurnal Finansial Beban Matrai Beban Air Beban Listrik Beban Listrik Beban Alat Kebersihan Beban ATK Beban Cetak Beban Penggandaan fotocopy Beban Surat Kabar Beban Makan dan Minuman rapat Beban Makan dan Minum Tamu Beban Makan dan Minum Kantor Lurah Beban BBM Beban Jasa Service kendaraan Beban Suku Cadang Beban pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Beban Alat Listrik dan Elektronik Beban BBM Beban Spanduk Beban Honorarium Beban ATK PKK Beban Hadiah Lomba Beban Transportasi Beban Makan dan Minum PKK Kas dibendahara pengeluaran	1.075.000 1.700.000 1.708.000 502.000 5.057.900 15.770.200 7.960.000 1.092.000 600.000 6.200.000 4.099.000 3.025.000 2.020.000 525.000 700.000 2.133.000 2.580.000 1.980.000 2.000.000 8.400.000 1.400.000 3.350.000 900.000 2.500.000	
				77.277.100

		Jurnal Anggaran Belanja Matrai 1.075.000 Belanja Air 1.700.000 Belanja Listrik 1.708.000 Belanja Listrik 502.000 Belanja Alat Kebersihan 5.057.900 Belanja ATK 15.770.200 Belanja Cetak 7.960.000 Belanja Penggandaan fotocopy 1.092.000 Belanja Surat Kabar 600.000 Belanja Makan dan Minuman rapat 6.200.000 Belanja Makan dan Minum Tamu 4.099.000 Belanja Makan dan Minum Kantor Lurah 3.025.000 Belanja BBM 2.020.000 Belanja Jasa Service kendaraan 525.000 Belanja Suku Cadang 700.000 Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 2.133.000 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 2.580.000 Belanja BBM 1.980.000 Belanja Spanduk 2.000.000 Belanja Honorarium 8.400.000 Belanja ATK PKK 1.400.000 Belanja Hadiah Lomba 3.350.000 Belanja Transportasi 900.000 Belanja Makan dan Minum PKK 2.500.000 Estimasi perubahan SAL		77.277.100
30 Nov 2017		Jurnal Finansial Kas dibendahara pengeluaran SKPD 77.277.100 RK PPKD Jurnal Anggaran Tidak ada jurnal anggaran		77.227.100

		karena bukan merupakan transaksi pendapatan atau belanja (menerima SP2D LS dari kuasa BUD untuk pengisian kas)		
--	--	--	--	--

Sumber : Data yang diolah penulis, 2020

C. Buku Besar

Selanjutnya Kantor Camat Bandar Petalangan memposting ke Buku Besar seperti berikut:

Tabel 4.4
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Buku Besar
November 2017

Tgl	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
14 Nov 2017	SPJ GU	0001/BP/XI /2017		77.227.100	77.277.100
30 Nov 2017	Pembayaran SPP GU		77.277.100		0

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan

Tabel 4.5
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Buku Besar
November 2017

Tgl	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
03 Nov 2017	Pembayaran gaji PNS Kator Camat Bandar Petalangan bulan November 2017	5246/SP2D/ 2017		79.020.482	79.020.482
03 Nov 2017	Dibayar honorarium jasa kebersihan	5251/SP2D/ 2017		18.720.000	97.740.482
30 Nov 2017	Pembayaran SPP GU			77.277.100	175.017.582

Sumber: Kantor Camta Bandar Petalangan

Tabel 4.6
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Buku Besar
November 2017

Tgl	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
03 Nov 2017	Pembayaran Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Kantor Camat Bandar Petalangan bulan November 2017	5246/SP2D/ 2017	57.402.800		57.402.800

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan

D. Buku Besar Pembantu

Setelah memposting ke Buku Besar, selanjutnya untuk mencatat rincian rekening tertentu digunakan Buku Besar Pembantu seperti berikut ini:

Tabel 4.7
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Buku Besar Pembantu
November 2017

Tgl	No. Bukti	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
03 Nov 2017	5246/ SP2D/ 2017	Pembayaran Gaji PNS/Uang Representasi Kantor Camat Bandar Petalangan bulan November 2017	57.402.800			57.402.800

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan

Tabel 4.8
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Buku Besar
November 2017

Tgl	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
03 Nov 2017	Dibayar honorarium jasa kebersihan	5251/SP2D/ 2017	18.720.000		18.720.00

Sumber: kantor Camat Bandar Petalangan

E. Neraca Saldo

Tabel 4.9
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Buku Besar Pembantu
November 2017

No	Kode Rek	Nama Rekening	Jumlah	
			Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	1.1.1.02.01	Kas dibendahara penerimaan	0	0
2	1.1.1.03.01	Kas dibendahara pengeluaran	0	0
3	3.1.3.01.01	RK PPKD	0	175.017.582
4	9.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO	57.402.800	0
5	9.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga-LO	6.900.150	0
6	9.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan-LO	6.950.000	0
7	9.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum-LO	1.275.000	0
8	9.1.1.01.06	Tunjangan Beras-LO	4.562.460	0
9	9.1.1.01.08	Pembulatan Gaji-LO	985	0
10	9.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan-LO	1.929.087	0
11	9.2.1.02.02	Honorarium Jasa Kebersihan	18.720.000	0
12	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNs/Uang Representasi	57.402.800	0
13	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	6.900.150	0
14	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	6.950.000	0
15	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.275.000	0
16	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	4.562.460	0
17	5.1.1.01.08	Tunjangan Gaji	985	0
18	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.929.087	0
19	5.2.1.02.02	Honorarium Jasa Kebersihan	18.720.000	0
20	3.1.2.05.01	Estimasi Perubahan SAL	0	195.480.964

21	9.2.2.01.04	Beban Materai	1.075.000	0
22	9.2.2.03.02	Beban Air	1.700.000	0
23	9.2.2.03.03	Beban Listrik	1.708.000	0
24	9.2.2.03.03	Beban Listrik	502.000	0
25	9.2.2.01.05	Beban Alat Kebersihan	5.057.900	0
26	9.2.2.01.01	Beban ATK	15.770.200	0
27	9.2.2.06.01	Beban Cetak	7.960.000	0
28	9.2.2.06.02	Beban Penggandaan Fotocopy	1.092.000	0
29	9.2.2.03.05	Beban Surat Kabar	600.000	0
30	9.2.2.11.02	Beban Makan dan Minum rapat	6.200.000	0
31	9.2.2.11.02	Beban Makan dan Minum tamu	4.099.000	0
32	9.2.2.11.02	Beban Makan dan Minum kantor lurah	3.025.000	0
33	9.2.2.01.06	Beban BBM	2.020.000	0
34	9.2.2.05.01	Beban Jasa Service	525.000	0
35	9.2.2.05.02	Beban Suku Cadang	700.000	0
36	9.2.2.20.12	Beban pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	2.133.000	0
37	9.2.2.01.03	Beban Alat Listrik dan Elektronik	2.580.000	0
38	9.2.2.01.06	Beban BBM	1.980.000	0
39	9.2.2.01.12	Beban Spanduk	2.000.000	0
40	9.2.1.02.06	Beban Honorarium perangkat desa	8.400.000	0
41	9.2.2.01.01	Beban ATK PKK	1.400.000	0
42	9.2.2.02.15	Beban Hadiah Lomba	3.350.000	0
43	9.2.2.03.12	Beban Transportasi	900.000	0
44	9.2.2.11.07	Beban Makan dan Minum PKK	2.500.000	0
45	5.2.2.01.04	Belanja Matrai	1.075.000	0
46	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.700.000	0
47	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.708.000	0
48	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	502.000	0
49	5.2.2.01.05	Belanja Alat Kebersihan	5.057.900	0
50	5.2.2.01.01	Belanja ATK	15.770.200	0
51	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.960.000	0
52	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan Fotocopy	1.092.000	0
53	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar	600.000	0
54	5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum rapat	6.200.000	0
55	5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum tamu	4.099.000	0
56	5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum kantor lurah	3.025.000	0
57	5.2.2.01.06	Belanja BBM	2.020.000	0

58	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	525.000	0
59	5.2.2.05.02	Belanja Suku Cadang	700.000	0
60	5.2.2.20.12	Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	2.133.000	0
61	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.580.000	0
62	5.2.2.01.06	Belanja BBM	1.980.000	0
63	5.2.2.01.12	Belanja Spanduk	2.000.000	0
64	5.2.2.02.06	Belanja Honorarium perangkat desa	8.400.000	0
65	5.2.2.01.01	Belanja ATK PKK	1.400.000	0
66	5.2.2.02.15	Belanja Hadiah Lomba	3.350.000	0
67	5.2.2.03.12	Belanja Transportasi	900.000	0
68	5.2.2.11.07	Belanja Makan dan Minum PKK	2.500.000	0
Jumlah			370.498.546	370.498.546

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan

F. Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan dan belanja/biaya. Untuk pendapatan dan biaya harus diakui pada periode akuntansi tertentu. Pendapatan dianggap telah diperoleh kalau jasa itu telah diserahkan kepada konsumen, meski kas belum diterima. Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan membuat Jurnal Penyesuaian, tetapi hanya dicatat didalam Jurnal Umum seperti berikut ini:

Tabel 4.10
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Jurnal Umum-Penyesuaian
Desember 2017

Tgl	No. Bukti	Uraian	Kode. Rek	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2017		Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		1.638.905.936	1.638.905.936
31 Des 2017		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		4.414.664.328	4.414.664.328
31 Des 2017		Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan		256.939.578	256.939.578

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan

Melakukan Penyusutan Terhadap Aset Tetap

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sudah melakukan penyusutan terhadap aset tetap. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, metode penyusutan yang dapat digunakan adalah metode garis lurus, metode menurun ganda dan metode unit produksi.

Yang termasuk aset tetap pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan bangunan. Untuk menggambarkan teknik pencatatan penyusutan dalam akuntansi

pemerintah, dengan memilih salah satu metode yang sesuai aset tetap bersangkutan dicontohkan sebagai berikut:

a. Penyusutan Peralatan dan Mesin

Contoh pada Neraca aset tetap peralatan dan mesin Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2017 senilai Rp1.638.905.936,52 dan penyusutan ditaksir selama 5 tahun tanpa nilai residu. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Untuk menghitung nilai penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}1.638.905.936,52 - 0}{5} = \text{Rp}327.781.187,4$$

Jurnal Penyesuaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Jurnal Umum-Penyesuaian
Desember 2017

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2017	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	327.781.187,4	327.781.187,4

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan

Maka nilai penyusutan pada peralatan dan mesin sebesar Rp327.781.187,4.
Seharusnya Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan membuat jurnalny sebagai berikut:

Tabel 4.12
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Jurnal Umum
Desember 2017

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
01 Des 2017	Jurnal Finansial Peralatan dan Mesin Kas dibendahara pengeluaran SKPD	1.638.905.936,52	1.638.905.936,52
	Jurnal Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Estimasi perubahan SAL	1.638.905.936,52	1.638.905.936,52

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020

Tabel 4.13
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Jurnal Penyesuaian
November 2017

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2017	Jurnal Finansial Beban Peralatan dan Mesin Akumulasi Peralatan dan Mesin	327.781.187,4	327.781.187,4
	Jurnal Anggaran Tidak ada jurnal anggaran karena bukan merupakan transaksi pendapatan atau belanja		

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020

b. Penyusutan Gedung dan Bangunan

Contoh pada asset tetap gedung dan bangunan Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2017 senilai Rp4.414.664.328,86 dan penyusutan ditaksir 5 tahun tanpa nilai residu. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Penyusutan gedung dan bangunan pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tidaklah wajar. Karena menurut Undang-undang Pajak Penghasilan masa manfaat harta berwujud berupa gedung dan bangunan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu bangunan bersifat permanen dan bangunan bersifat tidak permanen. Bangunan bersifat permanen memiliki masa manfaat minimal 20 tahun dan bangunan bersifat tidak permanen memiliki masa manfaat minimal 10 tahun. Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Misalnya barak atau asrama yang terbuat dari kayu untuk karyawan.

Seharusnya neraca asset tetap gedung dan bangunan Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2017 senilai Rp4.414.664.328,86 dan penyusutan ditaksir 25 tahun tanpa nilai residu karena bersifat permanen. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Untuk menghitung nilai penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}4.414.664.328,86 - 0}{25} = \text{Rp}176.586.573,2$$

Jurnal Penyesuaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Jurnal Umum-Penyesuaian
Desember 2017

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2017	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	176.586.573,2	176.586.573,2

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan

Maka nilai penyusutan pada gedung dan bangunan sebesar Rp176.586.573,2.

Seharusnya Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan membuat Jurnalnya sebagai berikut:

Tabel 4.15
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Jurnal Umum
Desember 2017

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
01 Des 2017	Jurnal Finansial Gedung dan Bangunan Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	4.414.664.328,86	4.414.664.328,86

	Jurnal Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Estimasi Perubahan SAL	4.414.664.328,86	4.414.664.328,86
--	---	------------------	------------------

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020

Tabel 4.16
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Jurnal Penyesuaian
Desember 2017

Tgl	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2017	Jurnal Finansial Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Jurnal Anggaran Tidak ada jurnal anggaran karena bukan merupakan transaksi pendapatan atau belanja	176.586.573,2	176.586.573,2

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020

G. Laporan Keuangan

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan membuat Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 seperti Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran II), Neraca (Lampiran I), Laporan Operasional (Lampiran III), Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran IV), dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

H. Jurnal Penutup

Selanjutnya Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan membuat Jurnal Penutup, tetapi hanya dicatat didalam Jurnal Umum seperti berikut:

Tabel 4.17
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan
Jurnal Umum-Penutup
Per 31 Desember 2017

Tgl	No. Bukti	Uraian	Kode. Rek	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des 2017		Surplus/Defisit	4.3.7	3.801.016.301	
		Beban pegawai	4.3.1		1.643.381.876
		Beban barang	4.3.2		0
		Beban persediaan	4.3.3		900.007.307
		Beban jasa	4.3.4		718.489.000
		Beban pemeliharaan	4.3.5		163.902.219
		Beban perjalanan dinas	4.3.6		127.788.000
		Beban penyusutan dan amortisasi	4.3.7		247.447.899

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan

4.2.2 Prosedur Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

1. Prosedur Penerimaan Kas

Untuk merealisasikan pendapatan retribusi pada OPD, pengguna anggaran menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan menyerahkan kepada wajib retribusi dan bendahara penerimaan. Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui

bendahara penerimaan OPD atau menyetorkannya langsung ke kas daerah. Jika wajib retribusi membayar melalui bendahara penerimaan OPD, maka bendahara penerimaan SKPD membuat surat tanda bukti pembayaran bagi wajib retribusi.

Selanjutnya, bendahara penerimaan OPD membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan menyetorkan uang ke kas daerah, STS diotorisasi oleh bank dan diserahkan kepada bendahara penerimaan OPD. Kemudian bank membuat nota kredit dan menyampaikan pada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Apabila pembayaran dilakukan oleh wajib retribusi langsung ke kas daerah, maka kas daerah membuat slip setoran sebanyak dua lembar yang diserahkan kepada wajib retribusi. Oleh wajib retribusi salah satunya diserahkan kepada bendahara penerimaan OPD, bendahara penerimaan membuat surat tanda bukti pembayaran dan menyerahkan kepada wajib retribusi. Selanjutnya bank membuat nota kredit dan menyampaikan kepada BUD.

Jika pembayaran dilakukan wajib retribusi melalui bendahara penerimaan pembantu, maka alurnya sama dengan pembayaran melalui bendahara penerimaan OPD, namun seluruh bukti penyetoran dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara penerimaan pembantu dan diserahkan ke bendahara penerimaan OPD paling lambat tanggal lima bulan berikutnya.

Untuk penerimaan kas dari lain-lain PAD yang sah dan pendapatan lainnya oleh bendahara penerimaan OPD dibuatkan surat tanda bukti pembayaran dan

diserahkan pada pihak yang membayar. Selanjutnya, dibuat STS dan uang disetorkan ke bank kas daerah. Bank akan mengotorisasi STS tersebut dan menyerahkan kepada bendahara penerimaan OPD, dan bank membuat nota kredit dan menyampaikan kepada BUD.

Berikut ini gambar siklus Penerimaan Kas pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan :

Dari siklus penerimaan kas dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan kas yang dilakukan oleh Kantor Camat Bandar Bandar Petalangan untuk mempermudah pengontrolan dana yang diterima dan memudahkan pencatatan atas penerimaan kas yang dilakukan oleh Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

2. Prosedur Pengeluaran Kas

Berdasarkan SPAD yang diterima bendahara pengeluaran OPD membuat SPP-UP terdiri dari surat pengantar SPP-UP, ringkasan SPP-UP, perincian SPP-UP, salinan SPD, draf surat pernyataan untuk ditandatangani pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD dan lampiran lain diperlukan.

Selanjutnya, SPP-UP dibuat diserahkan kepada PPK-OPD untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah diperiksa PPK-OPD membuat SPM-UP yang akan

ditorisasi oleh pengguna anggaran. Dari prosedur ini, bendahara pengeluaran OPD meregister SPP-UP dan PPK-OPD meregister SMP-UP.

SPM-UP yang sudah diotorisasi diserahkan kepada kuasa BUD, SPM-UP yang diterima oleh kuasa BUD diperiksa kelengkapannya, jika lengkap dibuat SP2D-UP empat rangkap oleh kuasa BUD, yang didistribusikan kepada OPD sebanyak dua lembar. Dari dua lembar tersebut, satu deregister untuk keperluan PPK-OPD dan satu lagi untuk bendahara pengeluaran OPD. Sisa dua lembar lagi diserahkan kepada bank untuk pencairan dan bank akan memberikan nita debit kepada kuasa BUD sebanyak satu lembar, dan satu lembar nya lagi dijadikan arsip bagi kuasa BUD dan dicatat dalam register SP2D.

Penerbitan SP2D dilakukan hanya sekali dalam setahun (Permendagri Nomor 55 Tahun 2008), untuk mengganti uang persediaan diterbitkan SP2D-GU (ganti uang persediaan). Selanjutnya, uang yang diterima oleh bendahara pengeluaran OPD dicatat pada buku kas umum dan buku simpanan/bank, dan kuasa BUD mencatat pengeluaran SP2D kedalam buku kas penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, oleh bendahara pengeluaran OPD uang tersebut dibelanjakan sesuai dengan rencana penggunaan.

Pada penerbitan SP2D-GU dan penerbitan SP2D-TU (tambah uang persediaan) prosedur yang digunakan sama dengan SP2D-UP namun dokumen untuk SPP-GU adalah surat pengantar SPP-GU, ringkasan SPP-GU, perincian penggunaan

SP2D-UP/GU yang lalu, bukti transaksi yang sah dan lengkap, salinan SPD, draf surat pernyataan untuk menandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD, dan lampiran lainnya yang sah.

Sedangkan untuk SPP-TU dokumen-dokumen terdiri dari surat pengantar SPP-TU, ringkasan SPP-TU, perincian rencana penggunaan TU, salinan SPD, draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD, surat keterangan yang membuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan, dan lampiran lainnya.

Berikut ini gambar siklus Pengeluaran Kas pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan :

4.2.3 Laporan Keuangan Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Pada dasarnya Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dimana komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang telah dibuat oleh Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan terdiri dari pendapatan, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, surplus/defisit, dan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah membuat Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Neraca

Neraca merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan aset yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka

panjang, dan ekuitas. Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah melakukan penyusutan terhadap asset tetap setiap tahunnya.

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah membuat Neraca sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasioanl adalah jenis laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaanya dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan terdiri dari pendapatan-LO yang terdiri atas pendapatan asli daerah, beban dari kegiatan operasional yang terdiri dari beban pegawai, beban barang,beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan amortisasi, surplus/defisit-LO.

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah membuat Laporan Operasional sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

Laporan Perubahan Ekuitas pada Kantor Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru terdiri dari ekuitas awal yang terdiri atas surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar terdiri atas koreksi nilai akumulasi penyusutan, koreksi nilai aset lainnya, dan koreksi nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dampak kumulatif perubahan kesalahan mendasar terdiri atas koreksi nilai aset tetap dan koreksi nilai akumulasi penyusutan, penyesuaian eliminasi untuk penghapusan akun RK PPKD (Rencana Kerja Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah) dan RK SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan ekuitas akhir.

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah membuat Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang memuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan rinci dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dan saran yang kiranya akan bermanfaat bagi instansi pemerintahan Kantor Camat Bandar Petalangan dalam menjalankan aktivitasnya.

5.1 Simpulan

1. Dasar akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Bandar Petalangan berbasis pada Basis Kas dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Basis Akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan Neraca.
2. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat Bandar Petalangan dimulai dari membuat Buku Kas Umum (BKU), dimana semua transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang terjadi dicatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya, membuat jurnal umum untuk semua transaksi. Kemudian memposting ke buku besar dan dilanjutkan membuat buku besar pembantu. Selanjutnya, membuat Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Laporan Keuangan, dan Jurnal Penutup.

3. Kantor Camat Bandar Petalangan tidak membuat jurnal yang terpisah antara penerimaan kas dan pengeluaran kas, semua jurnal digabungkan termasuk jurnal difinansial dan jurnal anggaran didalam satu buku jurnal yaitu Jurnal Umum.
4. Kantor Camat Bandar Petalangan telah membuat Jurnal Pentup tetapi belum membuat Jurnal Penyeuaian pada akhir periode.
5. Kantor Camat Bandar Petalangan telah membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
6. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansipada Kantor Camat Bandar Petalangan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

5.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi Pemerintah Kantor Camat Bandar Petalangan yaitu;

1. Sebaiknya dalam pencatatan transaksi Pemerintah Kantor Camat Bandar Petalangan melakukan pemisahan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas supaya mudah mengidentifikasi setiap transaksi-transaksi yang terjadi.
2. Sebaiknya Kantor Camat Bandar Petalangan membuat jurnal penyesuaian agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai kondisi ekonomi yang sesungguhnya, lebih akurat dan tidak terjadi salah saji informasi.
3. Sebaiknya Kantor Camat Bandar Petalangan dalam mengelola akuntansi keuangan daerah sehausnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan seperti hipotesis yang dibuat oleh penulis.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa menambah pokok permasalahan dari peneliti sebelumnya serta dapat memberikan saran yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Rambe, Omar Sakti, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhmmad Syam Kusufi, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sochib. 2018. *Pengantar Akuntansi 1*. Yogyakarta: Depublish.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surwadjono. 2015. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.
- Wild, Shaw dan Petta Chiap. 2014. *Financial Statement Analysis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara.
- <https://cpssoft.com/blog/akuntansi/akuntansi-pemerintah-perbedaanya-dengan-akuntansi-komersial/>.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau